

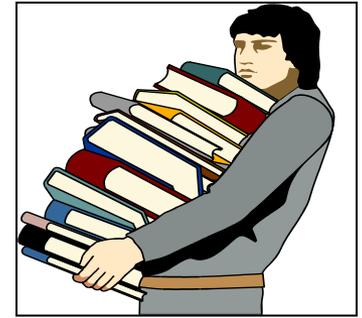
# IMPLEMENTASI Kebijakan Publik *(Lanjutan)*



## **TIM PENGAJAR :**

1. Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si. \*
2. Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.Si.

# Literatur :



1. Handbook Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode) – **Frank Fischer, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney, 2015.**
2. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan – **Wayne Parsons, 2008.**
3. Pengantar Analisis Kebijakan Publik – **William N. Dunn, 2005.**
4. Analisis Kebijakan – **Riant Nugroho, 2018.**
5. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis – **Dwiyanto Indiahono, 2017.**

# Literatur:

6. Analisis Kebijakan – Solichin Abdul Wahab, 2016.
7. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik – Joko Widodo, 2015.
8. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus) – Budi Winarno, 2012.
9. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi – Subarsono, 2006.

## Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

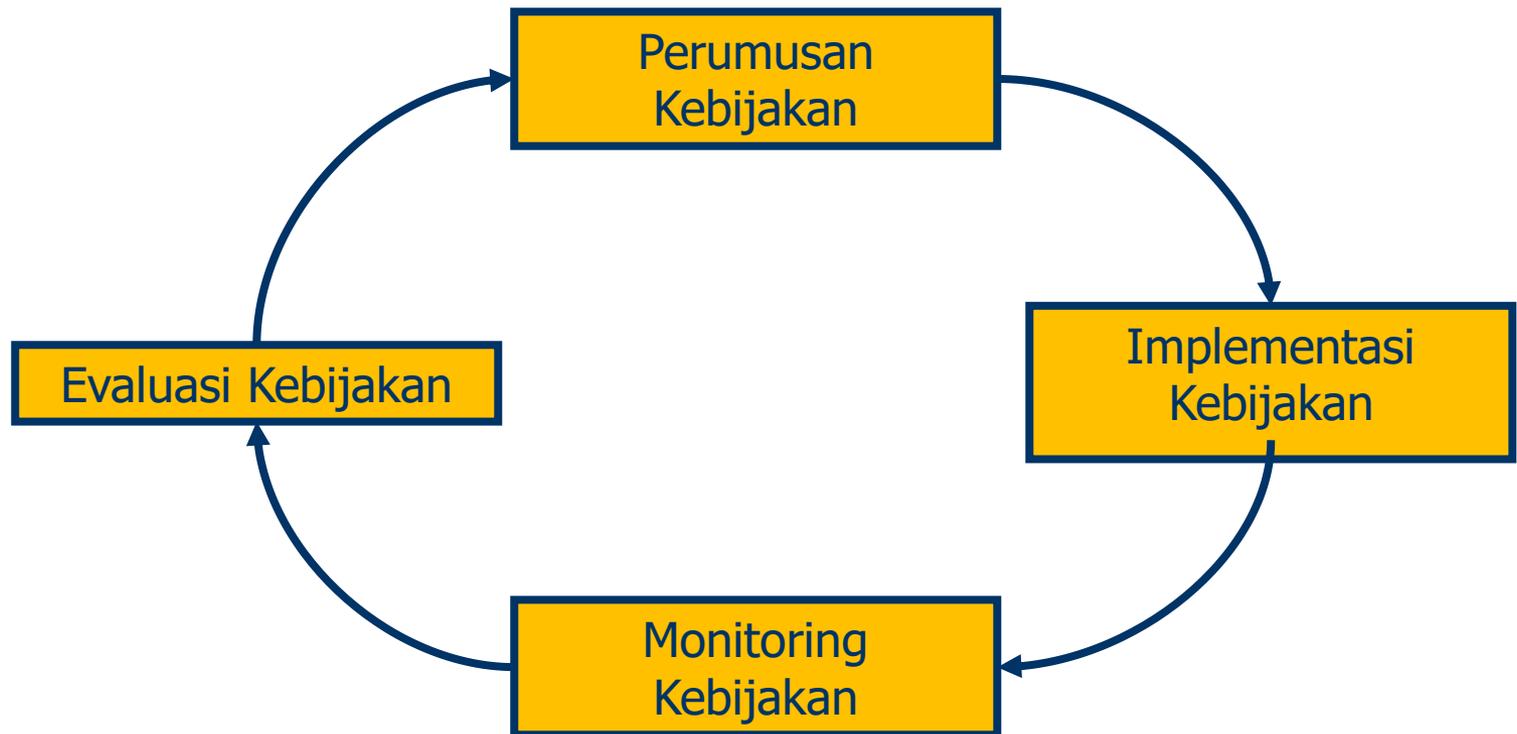
Setelah menyelesaikan mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik pada akhir semester, mahasiswa mampu menghubungkan pendekatan dan berbagai model implementasi kebijakan publik dengan realita kebijakan publik.



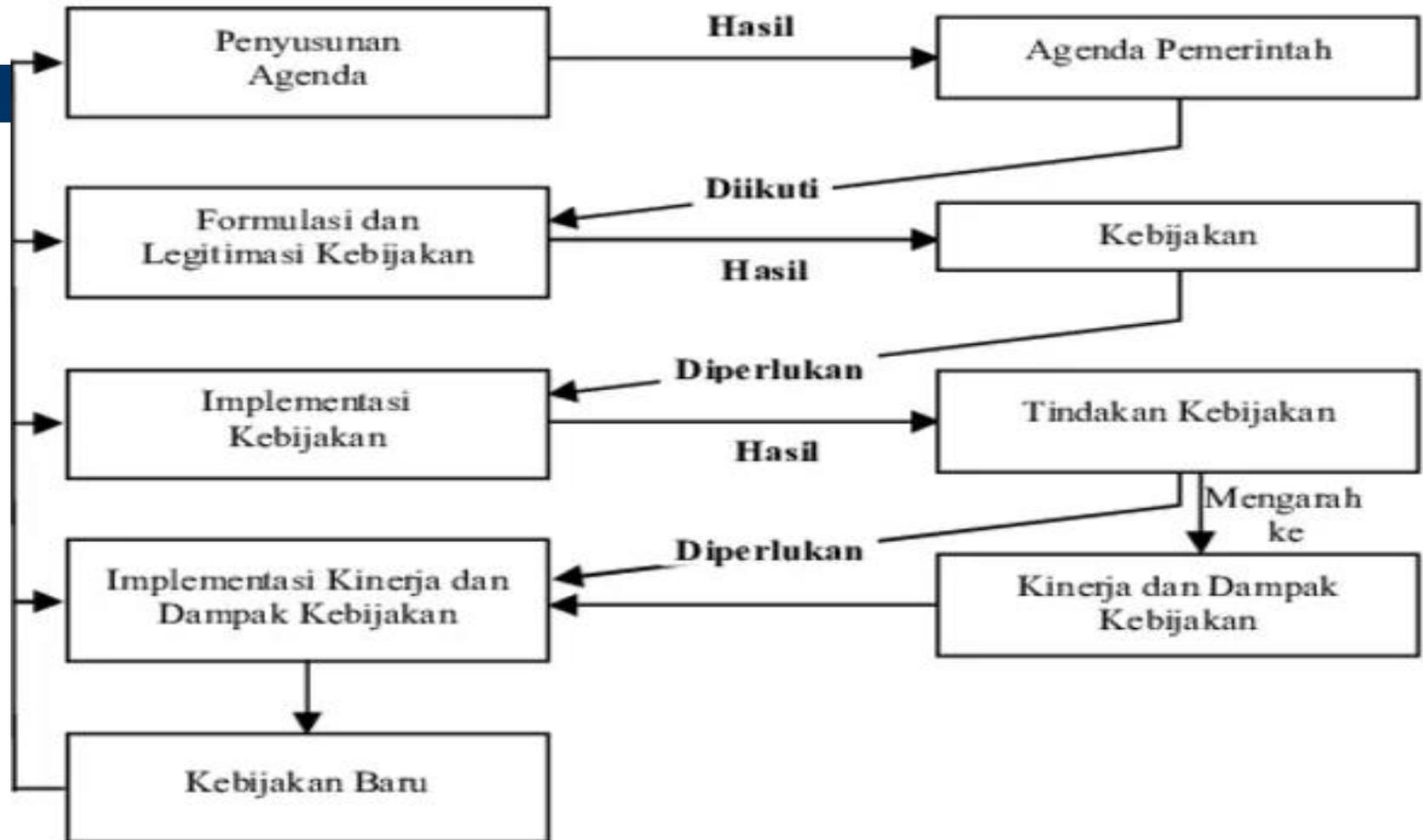
# Mengapa Mata Kuliah IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Penting bagi Mhswa Adm. Publik :

- Memiliki pengetahuan tentang kebijakan & proses kebijakan bagi para penentu kebijakan, para analis penerima kebijakan, dan analis independen (*policy stakeholders*)
- Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan
- Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah dan merumuskan cara utk mengatasi masalah kebijakan publik
- Meningkatkan kualitas analisis terhadap pelaksanaan kebijakan publik dalam pemenuhan kebutuhan publik
- Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (mendeskripsi, menjelaskan sebab-akibat tindakan pemerintah).

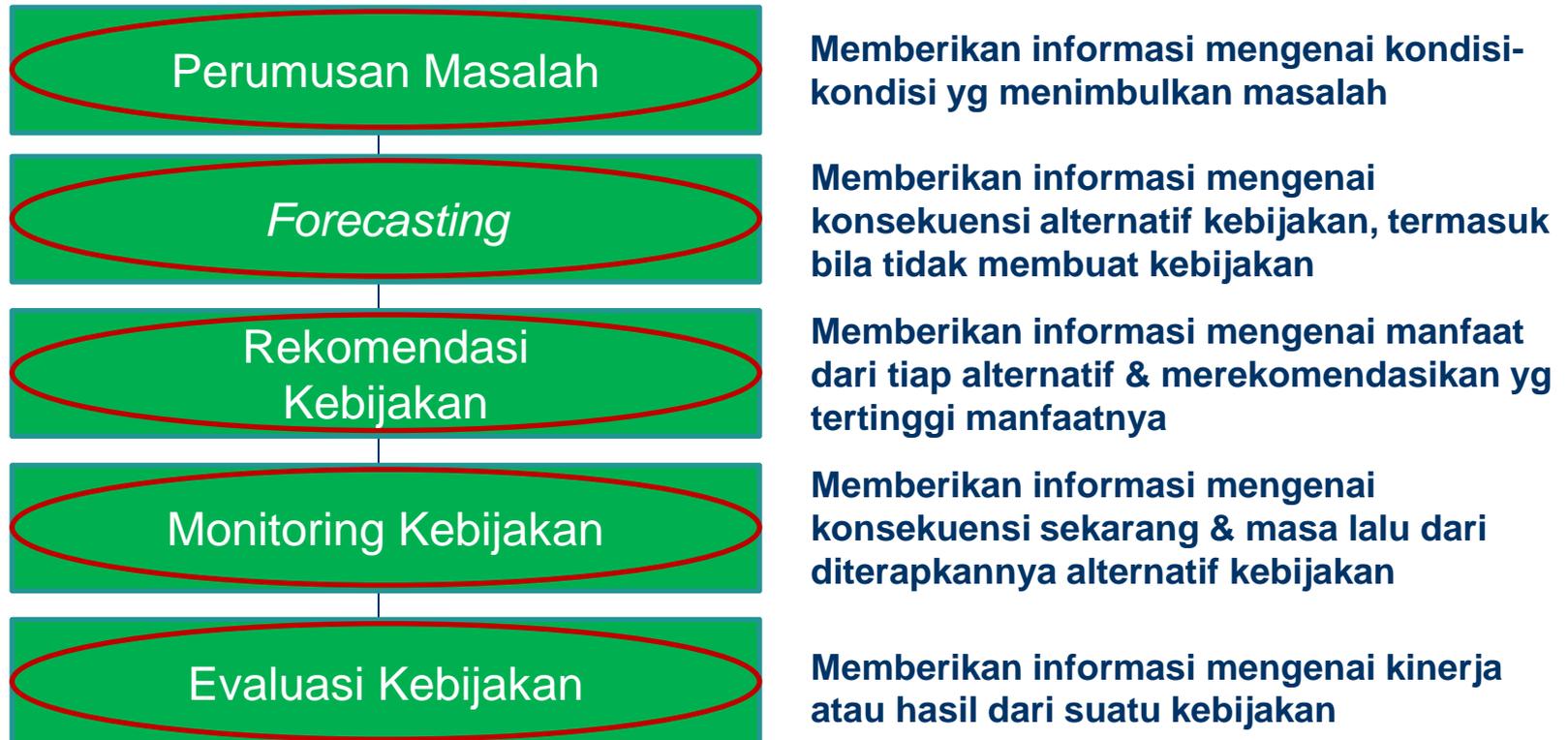
# SIKLUS Kebijakan Publik



# SIKLUS LENGKAP Analisis Kebijakan Publik



# KARAKTERISTIK Tahap Analisis Kebijakan Publik



# Topik Perkuliahan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- Memahami Implementasi Kebijakan
- Pendekatan Implementasi Kebijakan
- Faktor-faktor yg Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
- Teori-teori Implementasi Kebijakan
- Instrumen Kebijakan



# MAKNA Implementasi Kebijakan

- Istilah implementasi menunjuk pada pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah.
- Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

# Lanjutan...

## MAKNA Implementasi Kebijakan

- Tanpa implementasi, kebijakan tidak akan bisa diwujudkan hasilnya.
- Implementasi bukan proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
- Benturan kepentingan antar aktor, baik administrator, petugas lapangan maupun sasaran kebijakan, sering terjadi.
- Selama implementasi berlangsung, sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya.

# TUGAS Implementasi Kebijakan



- Secara umum: Mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yg telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yg berupa hasil kebijakan (*policy outcomes*).
- Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yg oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran/target group (Lipsky).

# AKTIVITAS Implementasi Kebijakan



- Pada prinsipnya, aktivitas implementasi kebijakan publik meliputi:
  1. Siapa pelaksananya?
  2. Siapa sasarannya?
  3. Berapa besar dananya dan diperoleh darimana?
  4. Bagaimana manajemennya?
  5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur?



# MEMAHAMI Implementasi Kebijakan

- **Implementation Gap:** Suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yg diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yg senyatanya dicapai sebagai hasil dari implementasi kebijakan (Dunsire dalam Wahab, 2016).
- **Implementation Capacity:** Kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yg telah ditetapkan tersebut dapat dicapai (Wahab, 2016).



# Lanjutan...

## MEMAHAMI Implementasi Kebijakan

- **Kegagalan implementasi kebijakan** ada dua kategori, yaitu:
  1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) : Kebijakan tdk dilaksanakan sesuai rencana, karena pihak-pihak yg terlibat di dalamnya tidak bisa bekerjasama atau telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Kegagalan ini lebih pada faktor teknis pelaksanaan dan unsur pelaksana.
  2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yg tdk berhasil) : Implementasi kebijakan tdk mencapai hasil tertentu ketika telah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi kondisi eksternalnya tdk menguntungkan (misalnya terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dsb) shg tdk berhasil mewujudkan dampak / hasil akhir yg dikehendaki.

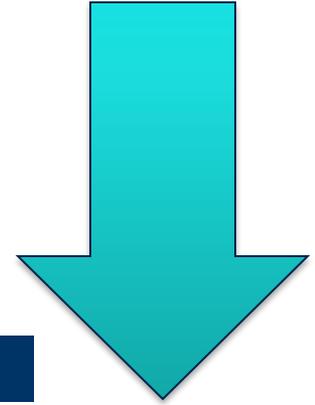
# TUGAS 1

Kumpul: **Senin, 13/11/2023 jam 12.00**

1. Cari sebuah kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan, yang mengandung *implementation gap*, *non implementation* atau *unsuccessful implementation*!
2. Lakukan analisis berdasarkan pemikiran Anda sendiri tentang implementasi kebijakan pemerintah tersebut!

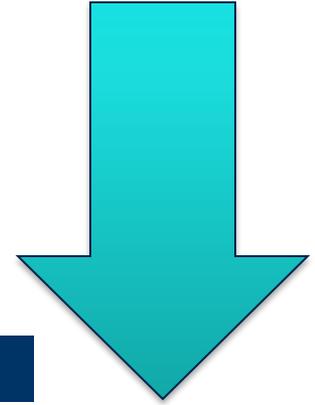
Kerjakan max 2 Imbr kertas A4, huruf Arial ukuran 14 spasi teks 1,5. Identitas mhswa letakkan di bagian atas.

# PENDEKATAN Implementasi Kebijakan



1. **Pendekatan TOP-DOWN (model rasional)**
  - Digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yg membuat implementasi sukses.
  - Sering disebut sebagai pendekatan perintah dan kontrol, dimana implementasi dipahami sebagai proses administrasi utk mencapai tujuan yg ditetapkan.
  - Pencapaian tujuan tsb sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah atasan kepada bawahan dan bagaimana cara atasan mengawasi bawahannya.

# Lanjutan... PENDEKATAN Implementasi Kebijakan



- Logika dalam pendekatan *top down* selalu diawali dengan kebijakan yg dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat) kepada para pelaku implementasi.
- Pemikiran akademis pendekatan *top down* tertuang dalam model implementasi kebijakan publik:
  1. Donald van Meter & Carl van Horn (1975)
  2. Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1978; 1986)
  3. Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)

# Lanjutan... PENDEKATAN Implementasi Kebijakan



## 2. Pendekatan BOTTOM-UP (*descriptive approach*)

- Pendekatan ini menyediakan suatu mekanisme utk bergerak dari *street level bureaucrats (the bottom)* hingga pada pembuatan keputusan tertinggi (*the top*) di sektor publik maupun privat.
- Birokrasi pada level bawah menduduki posisi kunci yg akan menentukan implementasi suatu kebijakan.
- Implementasi hanya akan berhasil jika pihak yg terkena dampak utama dari implementasi kebijakan dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan maupun implementasinya.

# Lanjutan... PENDEKATAN Implementasi Kebijakan

- Pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik atas pendekatan *top down* yg dianggap:
  1. Cenderung mengabaikan aktor-aktor lain dalam implementasi kebijakan akibat memandang pembuat keputusan (pusat) adalah aktor kunci.
  2. Pengaplikasiannya yg tidak bersifat kondisional.
- Pemikiran akademis pendekatan *bottom up* tertuang pemikiran Hanf, Hjern & Porter (1978); Elmore, Lipsky & Hjern (1981)

# Lanjutan... PENDEKATAN Implementasi Kebijakan

## 3. Model HIBRIDA (*hybrid model*)

- Model ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan antara dua pendekatan terdahulu dengan menggabungkan unsur-unsur model *top-down* dan *bottom-up*.
- Pemikiran akademis *hybrid model* tertuang dalam pemikiran Fischer; Miller; Sidney (2015).

# FAKTOR-FAKTOR yg Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

- Kebijakan yg sudah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* **bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.**
- Implementasi bersifat kompleks dikarenakan prosesnya dipengaruhi oleh berbagai variabel yg kompleks, baik variabel yg individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

# KEBERHASILAN Implementasi Kebijakan



- Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan **untuk meraih kinerja yang tinggi**, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara teori dikenal melalui **MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**.
- Keberhasilan kebijakan dikaji berdasarkan **perspektif PROSES IMPLEMENTASI** dan **perspektif HASIL**.

# Lanjutan... **KEBERHASILAN** Implementasi Kebijakan



1. **Perspektif PROSES IMPLEMENTASI** : Program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yg dibuat oleh pembuat program, yg mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.
2. **Perspektif HASIL** : Program pemerintah dikatakan berhasil jika program itu membawa dampak sesuai yg diinginkan.

Maka, suatu program bisa saja berhasil dari sudut prosesnya, tetapi bisa jadi gagal bila ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

# Lanjutan **KEBERHASILAN** Implementasi Kebijakan

“Rencana adalah **20% keberhasilan**,  
implementasi adalah **60% sisanya**, dan **20%  
sisanya** adalah bagaimana kita mengendalikan  
implementasi”

**Riant Nugroho**



# TUGAS 2

## Kumpul: max 8/11/2023

1. Akses google scholar di <https://scholar.google.com> untuk *download* 1 publikasi hasil penelitian ibu tentang implementasi kebijakan atau akses web jurnal Prodi Adm. Publik di <http://jpbm.fisip-unmul.ac.id>. untuk *download* 1 artikel tentang kebijakan publik.
2. Buat resume mengenai pandangan Anda sendiri tentang keberhasilan implementasi kebijakan dalam artikel hasil penelitian tsb (judul artikel & nama pengarang wajib dicantumkan dalam ulasan), berdasarkan perspektif proses atau perspektif hasil. Cantumkan link lengkap artikel yang diunduh pada bagian akhir resume sebagai Daftar Pustaka.

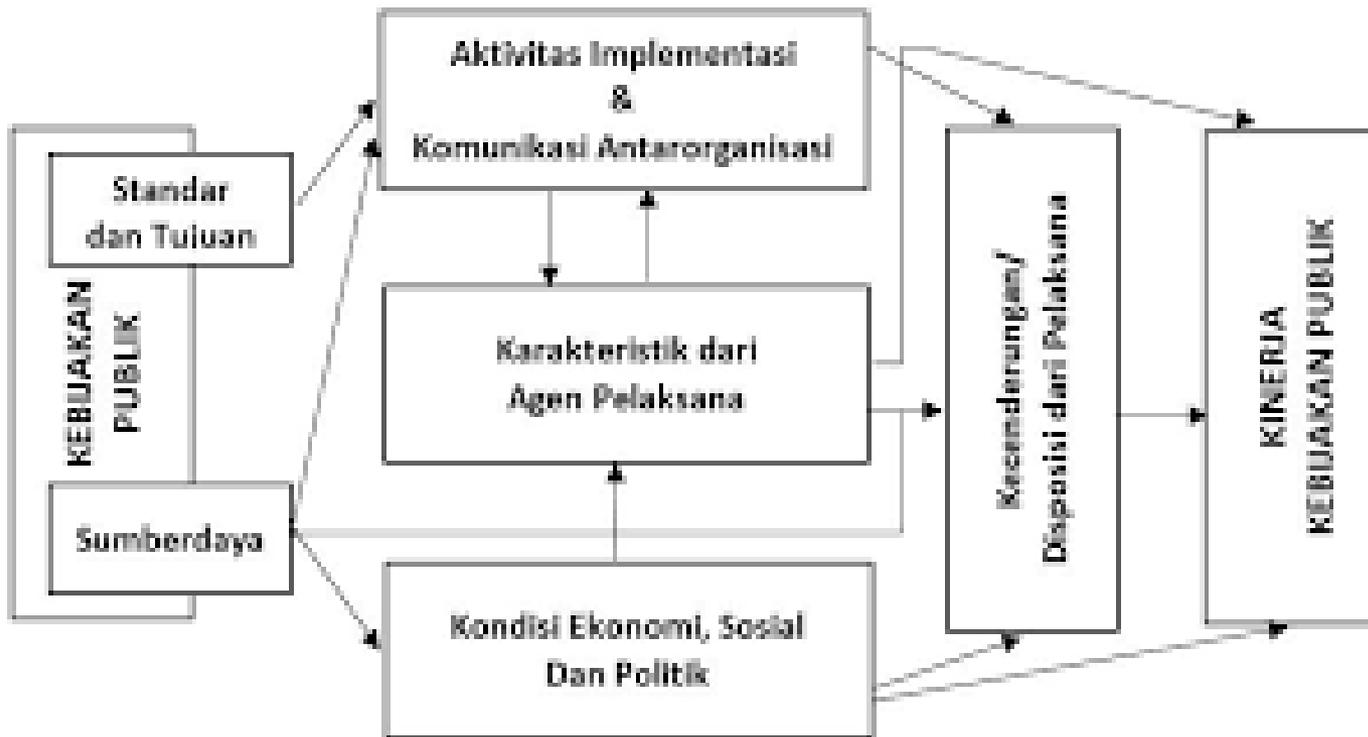
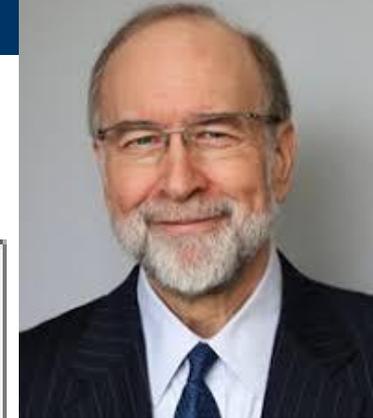
Kerjakan max 2 lbr kertas A4, huruf Arial ukuran 14 spasi teks 1,5. Identitas mhswa letakkan di bagian atas. Kirim dlm format PDF ke email: [dr.fajarapr99@yahoo.com](mailto:dr.fajarapr99@yahoo.com).

# TEORI

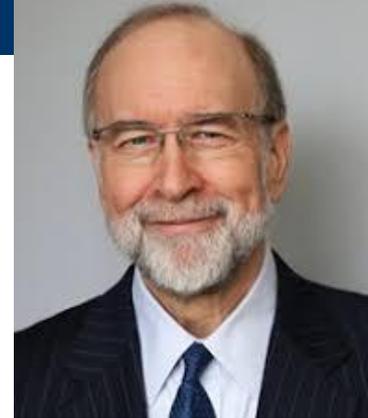
## Model Implementasi Kebijakan

1. Teori Donald S. van Meter & Carl E. van Horn
2. Teori George C. Edwards III
3. Teori Merilee S. Grindle
4. Teori Richard F. Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David O'Porter
5. Teori Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier
6. Teori G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli
7. Teori Kimberly Ripley & Richard Franklin
8. Teori Malcolm Goggin, Ann Bowman & James Lester
9. Teori Richard Matland
10. Teori Charles O'Jones
11. Teori David L. Weimer & Aidan R. Vining

# TEORI Donald van Meter & Carl van Horn (1975)



# Lanjutan TEORI Donald van Meter & Carl van Horn (1975)



STANDAR & SASARAN  
KEBIJAKAN

Harus jelas & terukur agar dapat terealisasi

SUMBERDAYA

Perlu *human resources* dan *non-human resources* yg baik

KARAKTERISTIK AGEN  
PELAKSANA

Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi utk berhasil

KOMUNIKASI ANTAR  
ORGANISASI & KEGIATAN

Mencakup struktur birokrasi, norma-norma & pola-pola hubungan yg terjadi dlm birokrasi

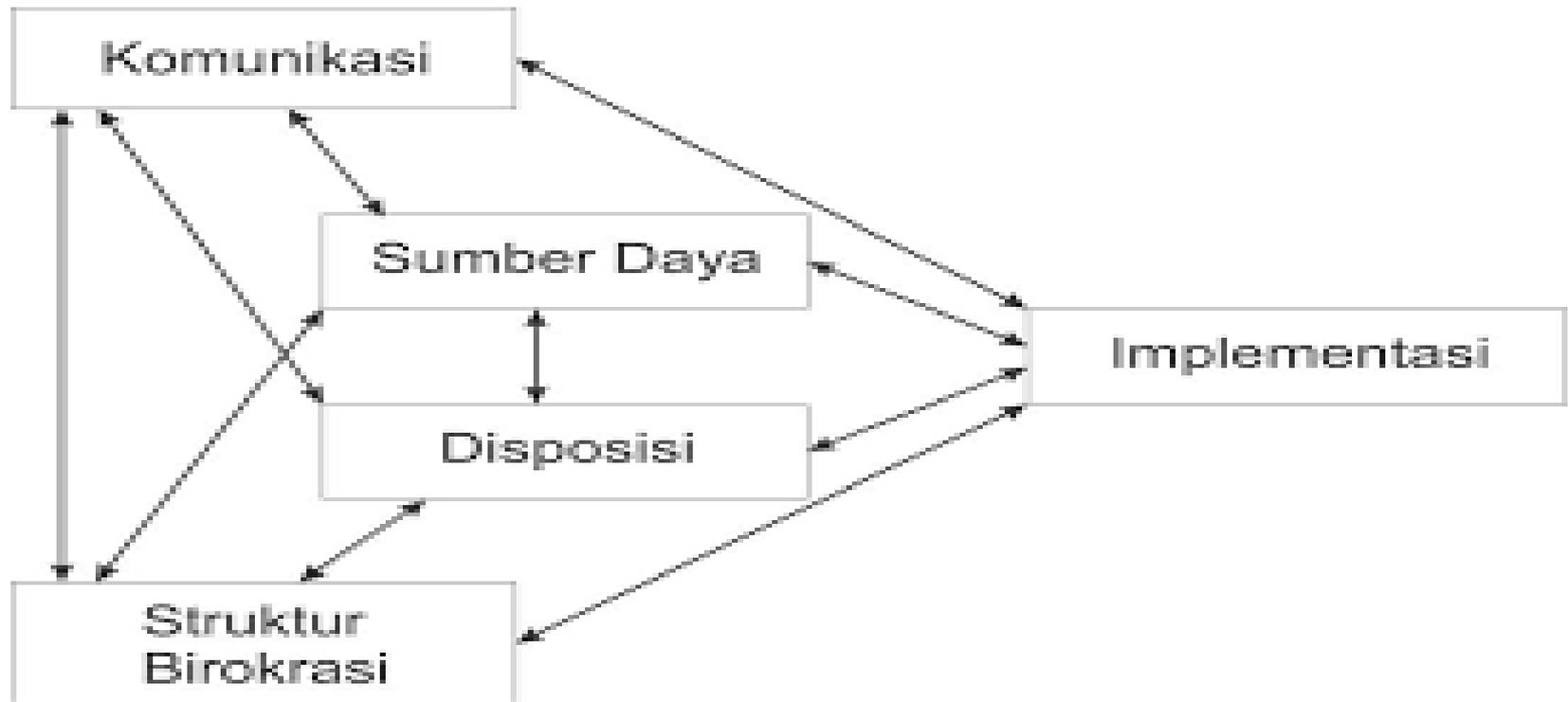
KONDISI EKOSOSPOL

Merujuk pada kondisivitas lingkungan ekosospol yg mendukung / menolak

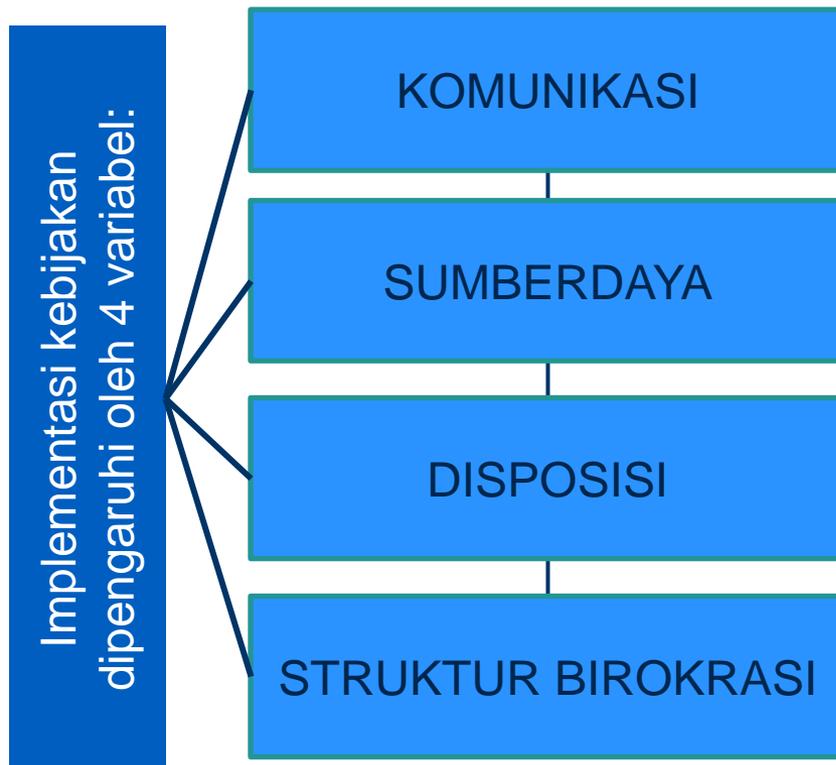
DISPOSISI IMPLEMENTOR

Mencakup respon implementor thd kebijakan, kognisi/pemahamannya & intensitas disposisi

# TEORI George Edwards III (1980)



# Lanjutan TEORI George Edwards III (1980)



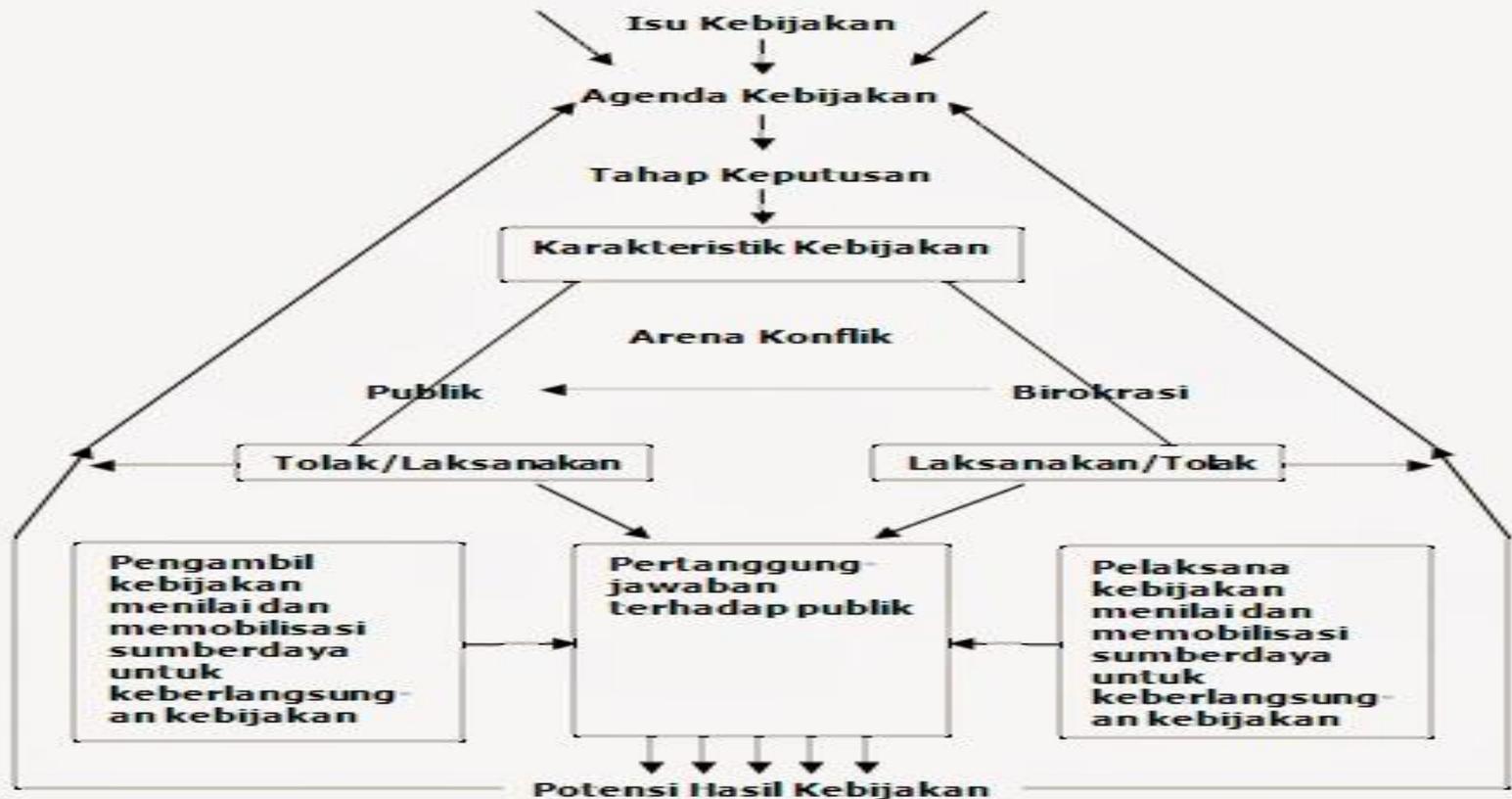
Implementor harus mengetahui apa yg harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, lalu mentransformasikan pada target group

Efektivitas kebijakan membutuhkan kuantitas & kompetensi pelaksana (SDM), informasi yg relevan, fasilitas & finansial

Implementasi membutuhkan respon, watak dan karakteristik implementor yg baik (kesadaran, komitmen, kejujuran, sifat demokratis, punya perspektif yg sama dgn policy maker)

Struktur birokrasi pelaksana kebijakan signifikan mempengaruhi, diantaranya SOP, kesesuaian karakteristik, norma & pola hubungan yg baik dlm badan2 pelaksana

# TEORI Marilee S. Grindle (1980)



# Lanjutan TEORI Marilee S. Grindle (1980)



Keberhasilan implementasi  
kebijakan dipengaruhi oleh 2  
variabel besar:

ISI KEBIJAKAN  
(*Content of Policy*)

KONTEKS  
IMPLEMENTASINYA  
(*Context of  
Implementation*)

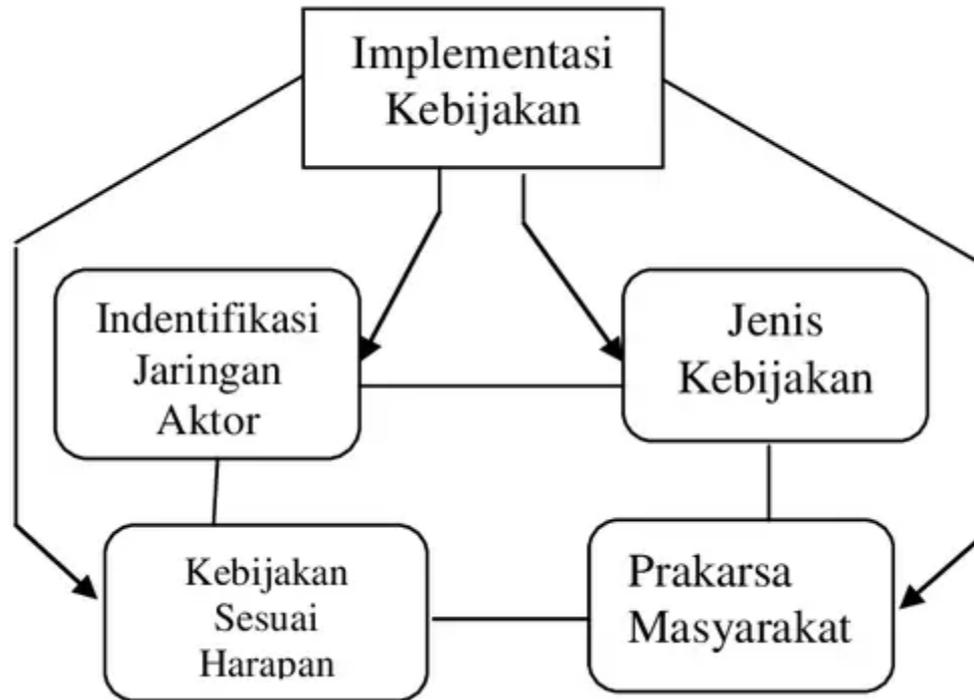
Mencakup:

1. Kepentingan yg terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yg akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yg diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (Siapa) pelaksana program
6. Sumberdaya yg dikerahkan

Mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap target group

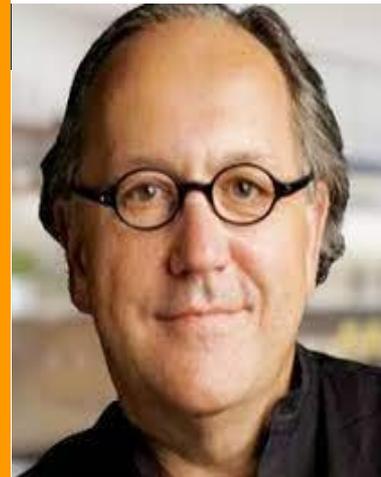
# TEORI Richard F. Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David O'Porter (1981)



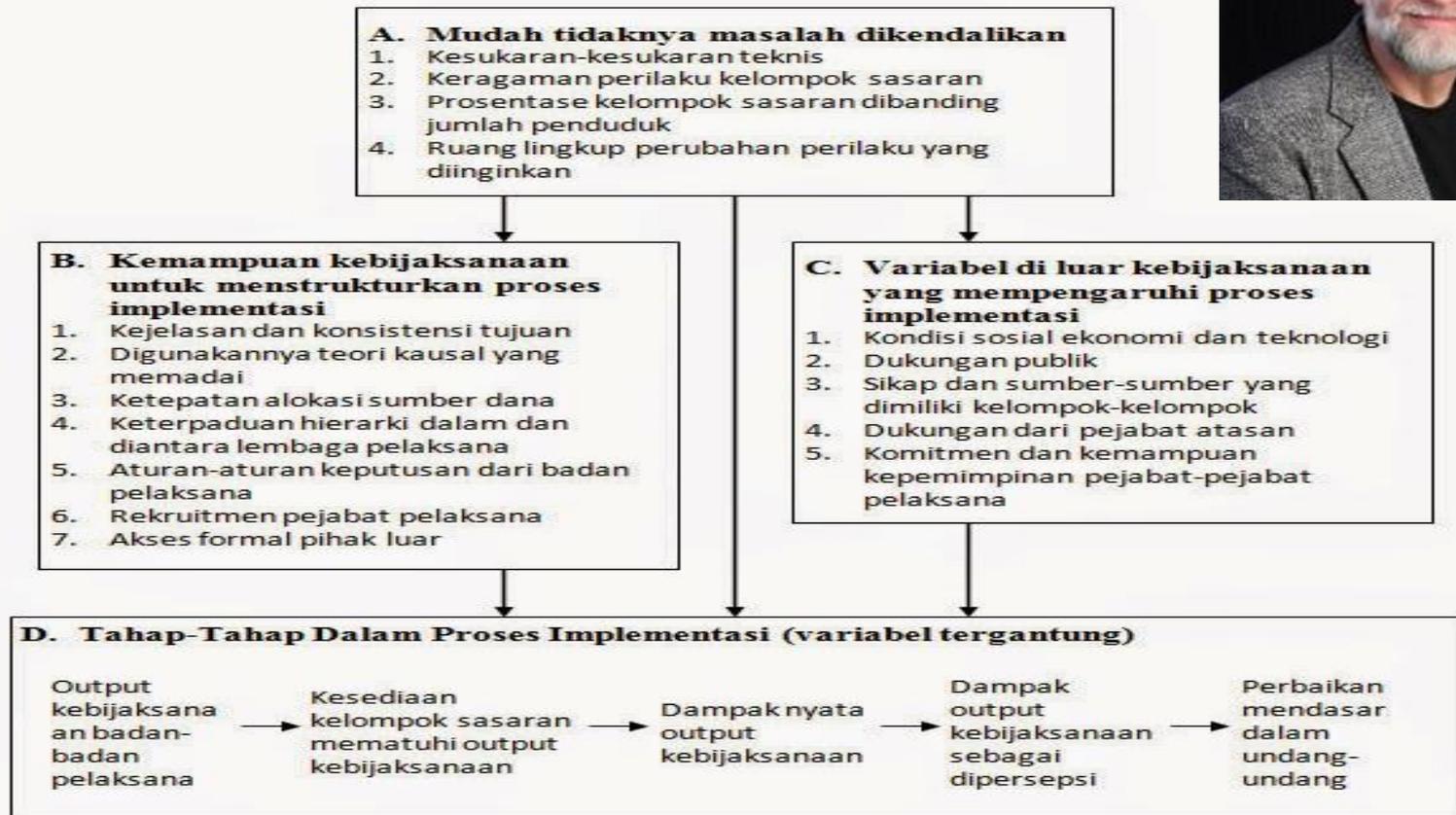
# Lanjutan TEORI

## Richard F. Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David O'Porter (1981)

- Identifikasi jaringan aktor yg terlibat dalam proses pelayanan & menanyakan pemahaman mereka atas tujuan, strategi, aktivitas & kontak-kontak yg dimiliki.
- Jenis kebijakan publik mendorong masyarakat utk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pemerintah namun hanya di tataran rendah.
- Maka kebijakan akan dibuat sesuai dgn harapan publik yg menjadi kliennya & sesuai pula dgn pejabat eselon rendah yg menjadi pelaksananya. Ada prakarsa masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

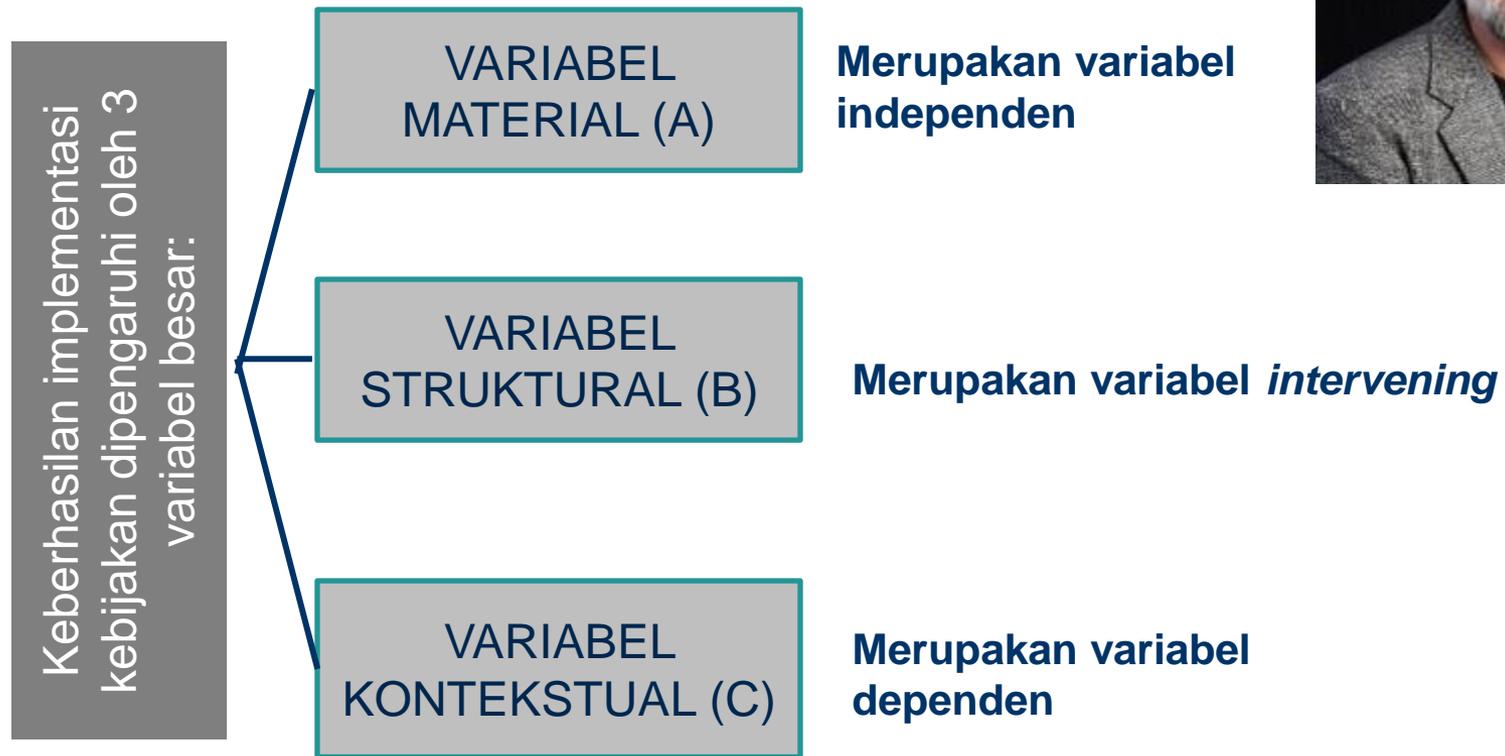


# TEORI Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)



# Lanjutan TEORI

## Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)



# TEORI G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rodinelli (1983)



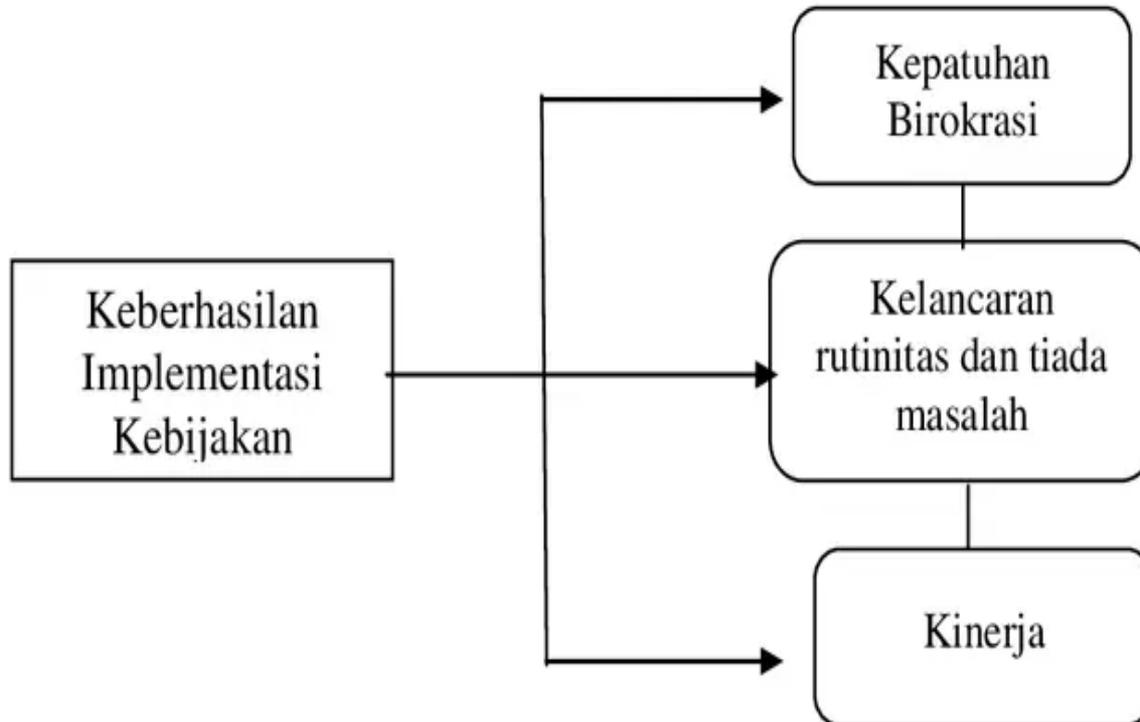
Model ini digunakan utk menganalisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi.

Substansi dari penyelenggaraan otonomi adalah dapat mengurus dirinya sendiri, baik dari sisi wewenang hukum, politik, pemerintahan, (terutama) ekonomi & kultural.

# Lanjutan... G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rodinelli (1983)



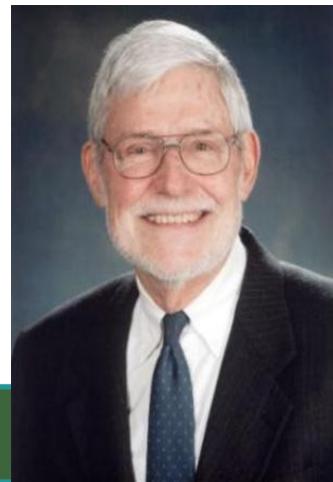
# TEORI Randall B. Ripley & Grace A. Franklin (1985)



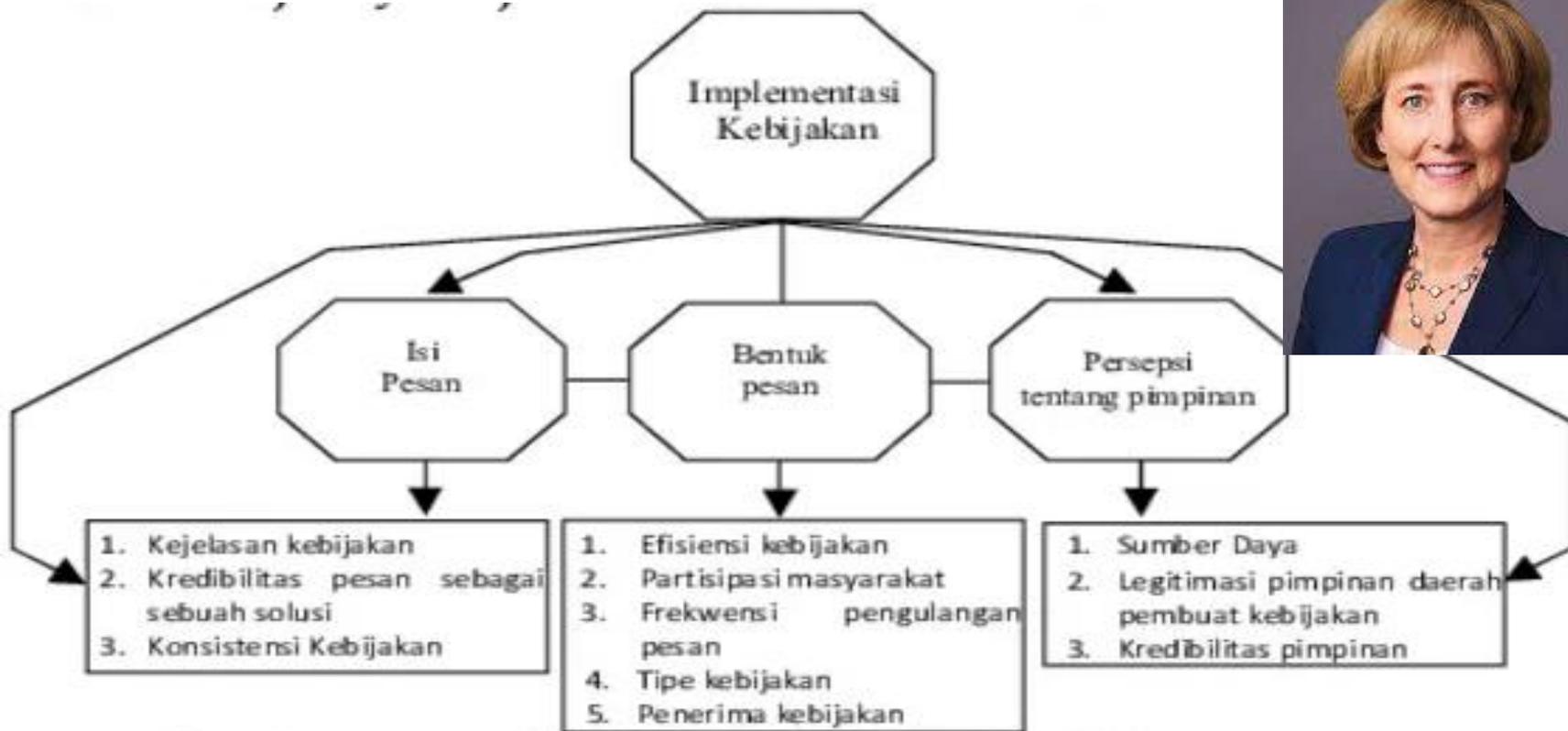
# Lanjutan TEORI Randall B. Ripley & Grace A. Franklin (1985)

2 fokus dalam implementasi kebijakan:

1. KEPATUHAN (*compliance*); apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal, dsb?
2. Apa yg terjadi; bagaimana KINERJA implementasi, apa yg dicapai, dsb? Beberapa hal yg penting dalam hal ini: a. Banyaknya aktor yg terlibat, b. Kejelasan tujuan, c. Partisipasi semua unit pemerintahan, d. Faktor-faktor yg mempengaruhi implementasi.



# TEORI Malcolm Goggin, Ann Bowman & James P. Lester (1990)



# TEORI Malcolm Goggin, Ann Bowman & James P. Lester (1990)



- Disebut dengan Model Komunikasi sebagai generasi ketiga model implementasi kebijakan.
- Model ini mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening dan dependen, serta meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

# TEORI Richard Matland (1995)



EFEKTIFNYA  
IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN

# Lanjutan TEORI Richard Matland (1995)



Disebut dengan Model Ambiguitas-Konflik yaitu :

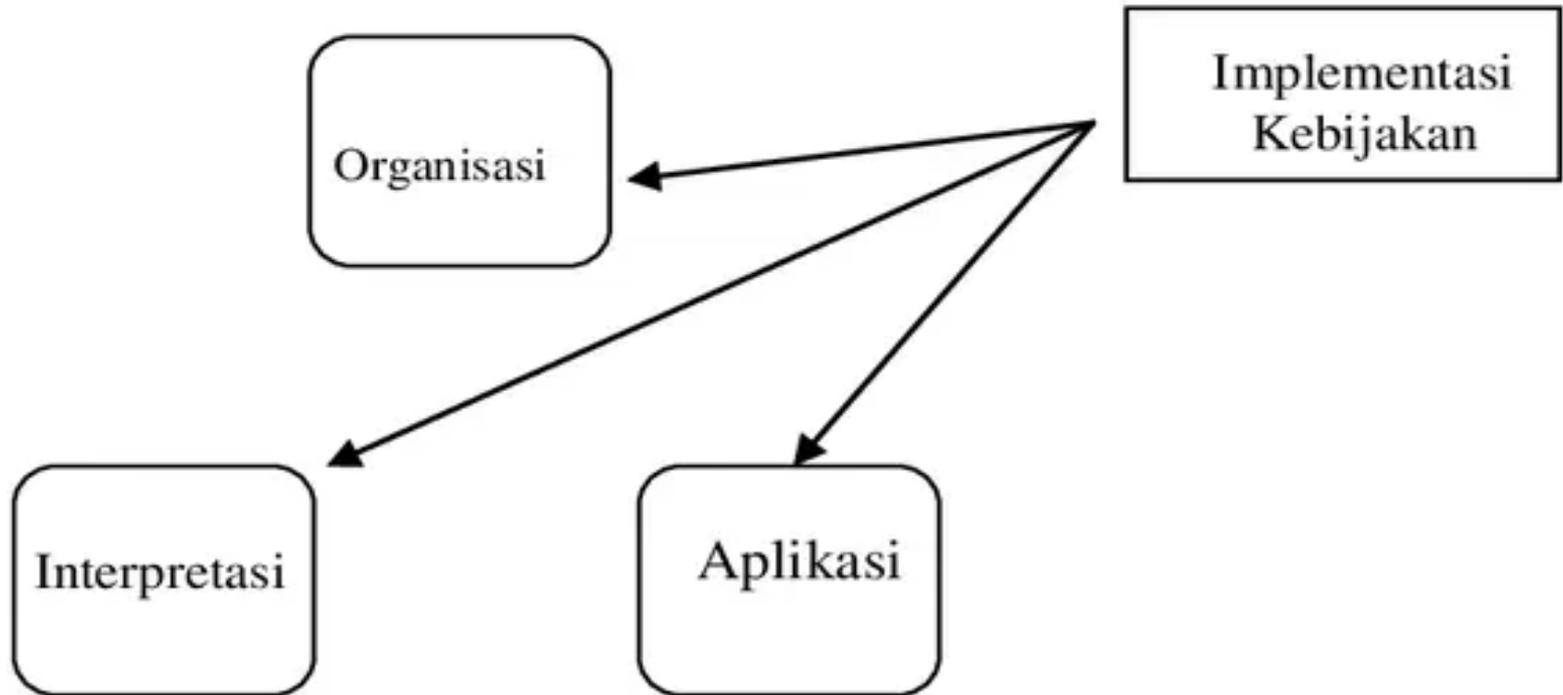
1. Implementasi secara ADMINISTRATIF adalah implementasi yg dilakukan dlm keseharian operasi birokrasi pemerintahan, ambiguitas & konfliknya RENDAH.
2. Implementasi secara POLITIK adalah implementasi yg perlu dipaksakan secara politik shg ambiguitasnya rendah tetapi konfliknya tinggi.
3. Implementasi secara EKSPERIMEN adalah implementasi yg dilakukan pada kebijakan yg mendua, tetapi tingkat konfliknya rendah.
4. Implementasi secara SIMBOLIK adalah implementasi pada kebijakan yg mempunyai ambiguitas tinggi, tetapi tingkat konfliknya tinggi.

# Lanjutan TEORI Richard Matland (1995)



	Low Conflict	High Conflict
Low Ambiguity	Administrative implementation	Political implementation
	Implementation decided by resources	Implementation decided by power
High Ambiguity	Example: smallpox eradication	Example: busing
	Experimental implementation	Symbolic implementation
	Implementation decided by contextual conditions	Implementations decided by coalition strength
	Example: headstart	Example: community action agencies

# TEORI Charles O'Jones (1996)



# Lanjutan TEORI Charles O'Jones (1996)



Implementasi kebijakan publik didukung oleh 3 pilar kegiatan:

ORGANISASI

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode utk menjadikan program berjalan

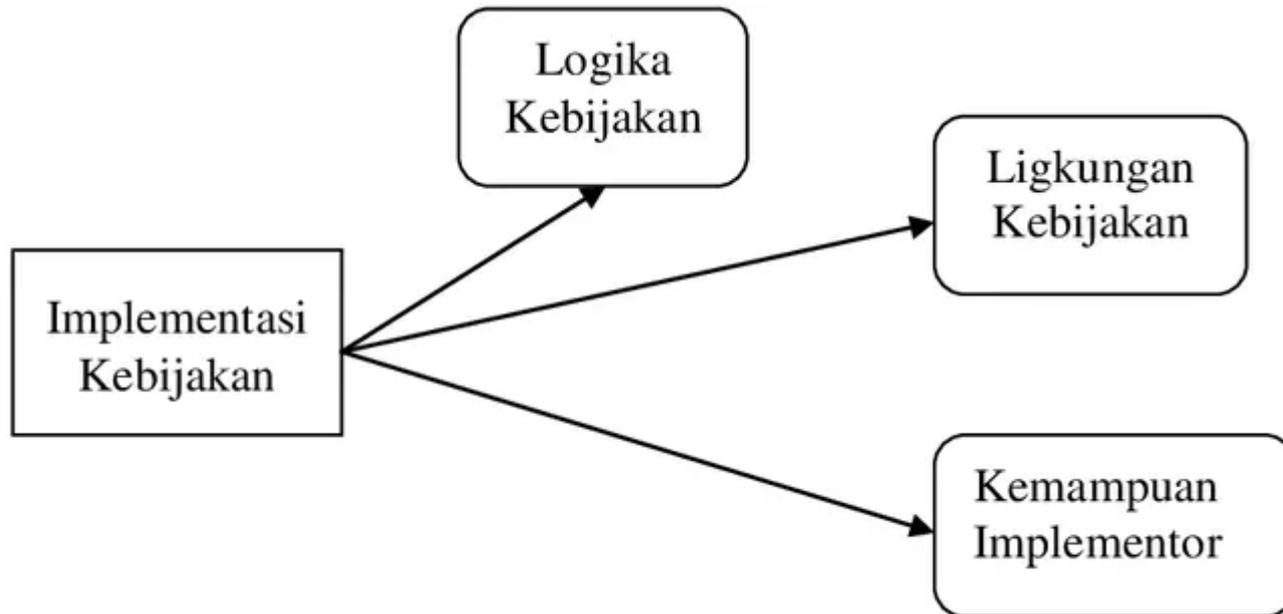
INTERPRETASI

Menafsirkan agar program menjadi rencana & pengarahan yg tepat & dapat diterima serta dilaksanakan

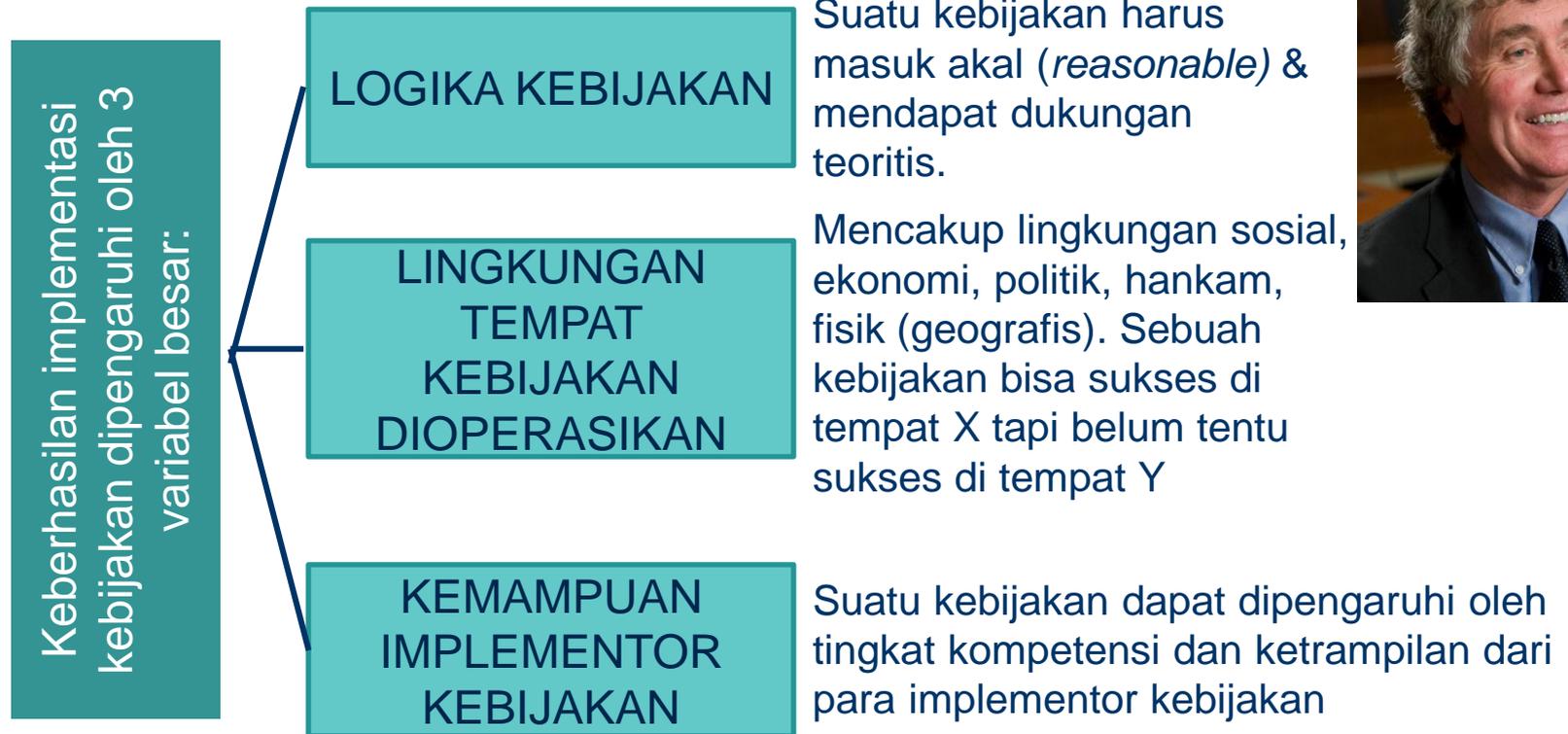
APLIKASI

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yg disesuaikan dgn tujuan / perlengkapan program

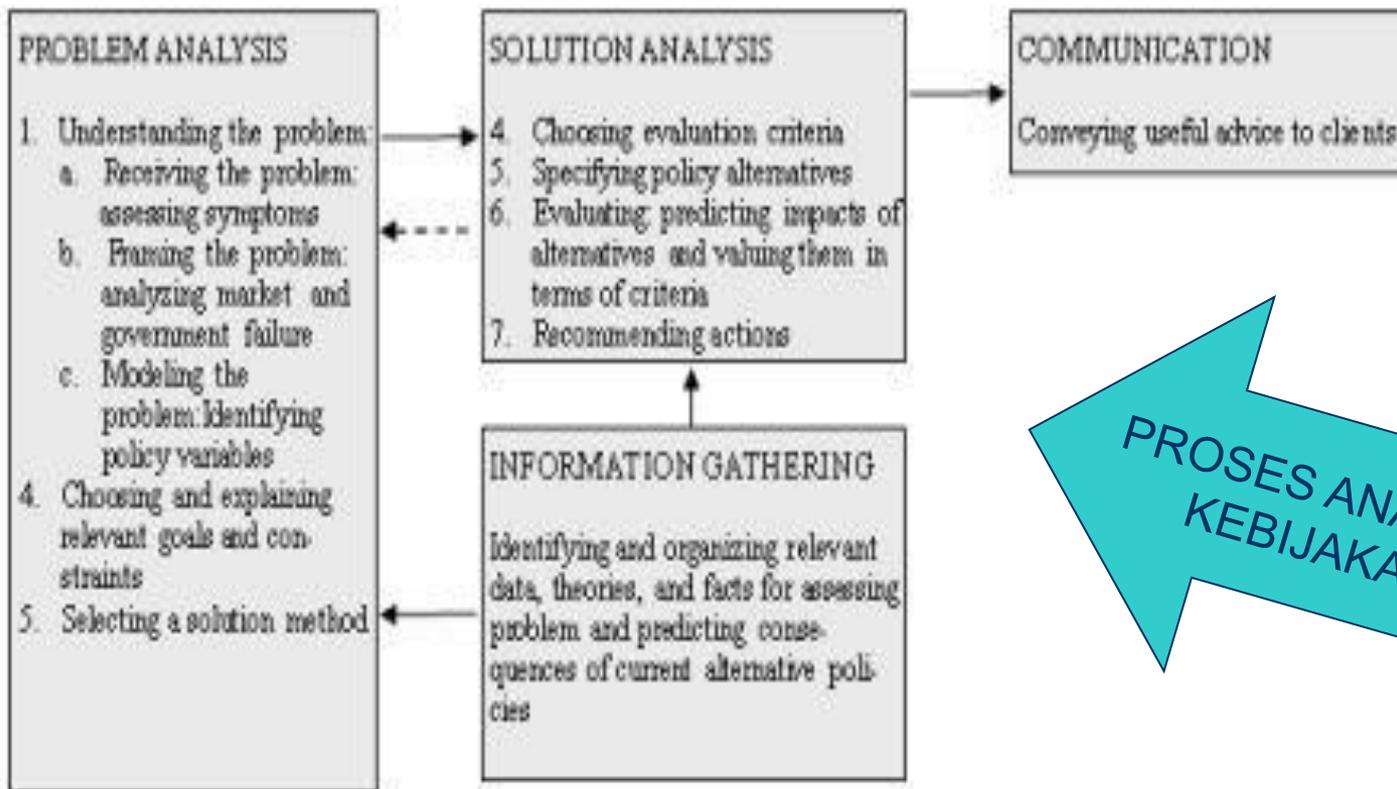
# TEORI David L. Weimer & Aidan R. Vinning (1999)



# Lanjutan TEORI David L. Weimer & Aidan R. Vinning (1999)



# Lanjutan TEORI David L. Weimer & Aidan R. Vinning (1999)



PROSES ANALISIS  
KEBIJAKAN

# KONDISI / SYARAT Implementasi Kebijakan yg Sempurna



1. Adalah produk dari organisasi yg padu seperti militer, dgn garis otoritas yg tegas
2. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan
3. Orang melaksanakan apa yg diminta dan diperintahkan
4. Ada komunikasi yg sempurna di dalam dan diantara organisasi
5. Tidak ada tekanan waktu (Christopher Hood).

# Mengapa

# PERFECT IMPLEMENTATION tidak pernah terwujud



- Ada hambatan kondisi eksternal
- Keterbatasan waktu dan sumberdaya
- Kebijakan tidak berdasar landasan pemikiran (teoritis) yg kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yg ingin dicapai
- Hubungan antara akibat & hasilnya jarang terjadi secara langsung
- Lembaga pelaksana jarang yg bisa mandiri
- Jarang ada konsensus yg bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan & cara mencapainya atau adanya pelibatan banyak aktor dan lembaga utk melaksanakan kebijakan
- Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi & koordinasi yg sempurna

# TUGAS Pengganti UAS

**Kumpul: max 8 Des 2023**

1. Pelajari kembali 11 teori/model Implementasi Kebijakan Publik yang telah dijelaskan pada pertemuan kuliah sebelumnya.
2. Buat resume mengenai 1 teori/model Implementasi Kebijakan Publik yang paling mudah Anda pahami dan 1 yang paling sulit Anda pahami. Uraikan alasannya sesuai pemahaman Anda masing-masing.

Kerjakan di 1 Imbr kertas A4, huruf Arial ukuran 14 spasi teks 1,5. Identitas mhswa letakkan di bagian atas. Kirim dlm format PDF ke email: [dr.fajarapr99@yahoo.com](mailto:dr.fajarapr99@yahoo.com).

**TERIMA KASIH**

**Semoga ilmu ini bermanfaat.**

